



## **BUPATI BULELENG**

# **P I D A T O**

**BUPATI BULELENG PADA PENYAMPAIAN NOTA  
PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BULELENG TAHUN  
ANGGARAN 2014 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN BULELENG. PADA TANGGAL 29 JUNI 2015**



## BUPATI BULELENG

---

---

### **PIDATO BUPATI BULELENG PADA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2014 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BULELENG PADA TANGGAL 29 JUNI 2015**

**“Om Swastyastu “**

**”Assalam Mualaikum Waramatullahi Wabarakatuh”**

**”Salam Sejahtera”**

**Yth. : - Saudara pimpinan dan para anggota DPRD  
Kabupaten Buleleng**

- Wakil Bupati Buleleng yang saya hormati**
- Saudara Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Buleleng  
yang saya hormati**
- Saudara Sekda, Para Assisten Sekda, Kepala Badan,  
Dinas, Bagian dan Kantor Unit Kerja Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Buleleng,**
- Para Pimpinan Partai Politik**

**Ysh. : - Para Wartawan baik cetak maupun elektronik**

- Para undangan serta hadirin sekalian yang saya hormati  
pula**

Sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur dihadapan Ida Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita ada dalam keadaan sehat lahir bathin guna melaksanakan tugas dalam rangka Sidang Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Pada kesempatan yang baik ini kami selaku pribadi dan Kepala Daerah mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa kepada Umat Muslim.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati;*

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, disampaikan kepada DPRD dengan maksud memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khusus Pasal 184 ayat 1 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir. Materi yang disampaikan sebelumnya telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dari tanggal 6 April 2015 s/d 5 Mei 2015.

Sehubungan dengan itu anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, maka hasil pelaksanaannya wajib untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara Transparan dan Akuntabel terhadap pengelolaan keuangan, pemanfaatan sumber daya dan pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Disamping itu, juga bertujuan untuk menyediakan Informasi Keuangan Daerah secara komprehensif yang berguna sebagai umpan balik perencanaan ke depan serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana yang Transparan dan Akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati;*

Sebagaimana kita ketahui, bahwa opini hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

Prestasi ini diraih berkat kerja keras kita bersama dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui ketaatan kita atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kita berharap di tahun mendatang dengan bekerja lebih baik dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan sebagaimana diketahui bahwa mulai Tahun Anggaran 2015 ini pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah menerapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual yaitu sistem pencatatan yang dimulai dari munculnya Hak dan Kewajiban yang dalam hal ini pencatatan transaksi tidak memperhatikan kas. Kalau tahun sebelumnya kita memakai Sistem Akuntansi berbasis Kas yaitu suatu sistem pencatatan diakui saat mempengaruhi kas. Dan laporan yang dibuat hanya 4 (empat) komponen Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 yang berbasis Akrual bertambah lagi 3 (tiga) jenis komponen

Laporan Keuangan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sehubungan dengan itu karena mempertahankan jauh lebih sulit maka, kami minta agar semua pimpinan SKPD dan jajarannya agar dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah senantiasa berpegang kepada Asas Kepatuhan dan Peningkatan Pengendalian Intern sehingga di tahun mendatang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetap dapat kita pertahankan.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati:*

Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan secara umum, Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan kondisi ekonomi makro daerah dalam kurun waktu satu tahun, sebagai gambaran indikator keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng lima tahun terakhir (dari tahun 2009 sampai dengan 2013) atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan menunjukkan perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku

sebesar 6,680 trilyun lebih dan tahun 2013 menjadi 10,022 trilyun lebih (angka sangat sementara) dan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 sebesar 3,266 trilyun lebih dan tahun 2013 meningkat menjadi 4,170 trilyun lebih (angka sangat sementara). Data diatas mencerminkan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan masyarakat berjalan efektif dan dapat menggerakkan kegiatan produksi, sehingga PDRB dan pendapatan daerah mengalami peningkatan yang menggambarkan keadaan perekonomian Buleleng cukup baik. Peningkatan PDRB, diikuti dengan pengendalian pertumbuhan penduduk sehingga berdampak terhadap PDRB perkapita atau kesejahteraan yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar 10,569 juta lebih dan tahun 2013 meningkat menjadi 15,701 juta lebih (angka sangat sementara).

Selanjutnya sejalan dengan keberhasilan dimaksud memacu pertumbuhan ekonomi, maka secara perlahan terjadi perubahan struktur perekonomian menuju arah yang lebih baik, karena telah terjadi pergeseran struktur perekonomian penduduk dari sektor pertanian (primer) menuju sektor jasa (tersier). Pada tahun 2012 sektor sekunder memberi sumbangan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga

berlaku sebesar 14,68% kemudian tahun 2013 mengalami pergeseran menjadi sebesar 14,75 %, sektor tersier tahun 2012 sebesar 55,80 % dan tahun 2013 menjadi 56,67 %. Sektor Primer tahun 2012 sebesar 29,52 % dan tahun 2013 menjadi 28,58 %.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati;*

Dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa, walaupun prosentase kontribusi sektor primer secara relatif semakin kecil, ini bukan berarti sektor pertanian diabaikan dan produksinya turun, tetapi secara absolut produksi sektor primer terus mengalami peningkatan, namun karena laju dan kecepatan pertumbuhan sektor primer lebih lambat dibandingkan dengan sektor skunder dan tersier sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor primer relatif tetap, dan sektor tersier semakin luas sehingga perbaikan struktur ekonomi daerah terwujud.

Kondisi tersebut di atas yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014, yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013, dan telah dilakukan Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 yang disahkan tanggal 20 November 2014

dan beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan mengalami peningkatan sebesar 104,045 milyar rupiah lebih dari anggaran semula sebesar 1.468,26 milyar rupiah lebih menjadi 1.572,30 milyar rupiah lebih atau meningkat 7,09%.
2. Anggaran Belanja mengalami peningkatan sebesar 75,84 milyar rupiah lebih dari anggaran semula sebesar 1.605,09 milyar lebih menjadi 1.680,93 milyar rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 4,73%.
3. Anggaran Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dirancang dalam perubahan APBD tahun 2014, yaitu pembiayaan netto sebesar 108,63 milyar rupiah lebih menurun dari anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar 136,83 milyar rupiah lebih.

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung dan capaian indikator kinerja program utama serta kegiatan yang menjadi tupoksi SKPD dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang pada masing-masing Urusan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh SKPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang

tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada bagian Pendapatan dari target yang ditetapkan setelah Perubahan APBD sebesar 1,572 trilyun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,543 trilyun rupiah lebih atau 98,17 % sehingga masih kekurangan dari target yang ditetapkan sebesar 28,71 milyar rupiah, hal ini karena adanya penurunan penerimaan beberapa sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Asli Daerah ( PAD )** dengan target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 209,22 milyar rupiah lebih terealisasi sebesar 219,68 milyar rupiah lebih atau 105,00%.

b. **Pendapatan Transfer**, target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 1,363 trilyun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,323 trilyun rupiah lebih atau 97,09%.

c. **Lain-lain Pendapatan yang Sah** dengan target anggaran setelah Perubahan APBD yang tidak ditargetkan terealisasi sebesar 467,73 juta rupiah lebih.

2. Dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar 121,97 milyar rupiah lebih atau 7,25% yaitu dari anggaran

setelah Perubahan APBD yang ditetapkan sebesar 1,680 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,558 triliun rupiah lebih atau 92,74%. dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Belanja Operasi**, dengan target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 1,440 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 1,360 triliun rupiah lebih atau 94,44%.
  - b. **Belanja Modal**, dengan target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 224,15 milyar rupiah lebih dan terealisasi sebesar 183,62 milyar rupiah lebih atau 81,92%.
  - c. **Belanja Tak Terduga**, dengan target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 8,43 milyar rupiah lebih terealisasi sebesar 7,025 milyar rupiah lebih atau 83,32%.
  - d. **Belanja Bagi Hasil – Transfer**, target anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 8,20 milyar rupiah lebih terealisasi sebesar 8,20 milyar rupiah lebih atau 100,00%.
3. Pembiayaan netto terealisasi sebesar 100,05% yaitu dari anggaran setelah Perubahan APBD sebesar 108,63 milyar rupiah lebih dan direalisasikan sebesar 108,68 milyar rupiah lebih.
4. Tercapainya realisasi pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar 93,31 milyar rupiah lebih, yang akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati;*

Posisi Keuangan Daerah dalam bentuk Aset, yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng pada akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar 1,93 triliun rupiah lebih, dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset lancar sebesar 188,07 milyar rupiah lebih;
2. Investasi Jangka Panjang sebesar 109,80 milyar rupiah lebih;
3. Aset Tetap senilai 1.459,52 milyar rupiah lebih;
4. Aset lainnya sebesar 182,02 milyar rupiah lebih;

Disamping komposisi Aset yang ada tahun 2014 terdapat kewajiban sebesar 27,25 milyar rupiah lebih yang terdiri dari :

1. Kewajiban Jangka Pendek sebesar 27,25 milyar rupiah lebih;
2. Kewajiban Jangka Panjang tidak ada. Melihat Aset Daerah yang dimiliki dibandingkan dengan kewajiban per 31

Desember 2014 Pemerintah Daerah memiliki kekayaan bersih sebesar 1,91 triliun rupiah lebih.

Selanjutnya Laporan untuk Arus Kas dapat kami jelaskan bahwa saldo awal yang kita miliki pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 111,63 Milyar rupiah lebih terdiri dari :

1. Arus Kas masuk sebesar 1,54 triliun rupiah lebih;
2. Arus kas keluar sebesar 1,37 triliun rupiah lebih.

Maka dari hasil perhitungan ini diperoleh saldo akhir kas per 31 Desember 2014 sebesar 93,31 Milyar rupiah lebih dengan rincian :

1. Saldo di Kas daerah sebesar 74,69 milyar rupiah lebih;
2. Saldo di Kas BLU RSUD sebesar 9,01 milyar rupiah lebih;
3. Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.199.800,-
4. Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP 9,6 milyar lebih.

*Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati;*

Demikian pokok – pokok Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, dan mengenai materi rinci dari laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
2. Rancangan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (ada tiga buku yaitu Buku I, Buku II dan Buku III);
3. Buku Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.

Laporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 26 Juni 2015 kepada Pimpinan Dewan yang terhormat dengan surat pengantar nomor 045.2/2525/BPKAD tertanggal 26 Juni 2015 untuk mendapat pembahasan dan mendapatkan penetapan dengan segera, dan kami berharap dalam pembahasan nanti dapat memberikan tanggapan dan saran yang sifatnya konstruktif guna dijadikan bahan perbaikan kinerja kami dan sebagai pedoman perencanaan dari pelaksanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang.

*Sidang Dewan yang terhormat;*

Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang dengan penuh perhatian telah mengikuti jalannya Sidang Paripurna Penyampaian nota

pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014, dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Buleleng atas kerjasamanya serta dukungannya selama ini dalam melaksanakan tugas Kemasyarakatan, Pembangunan dan Pemerintahan.

Sekian dan Terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

**Singaraja, 29 Juni 2015**  
**Bupati Buleleng**

**Putu Agus Suradnyana, ST.**